

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SIMPANAN  
QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI  
(PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Arifa  
C02214032**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Siti Arifa

NIM : C02214032

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah  
Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap  
Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat  
Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



Siti Arifa

NIM. C02214032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo”, yang ditulis oleh Siti Arifa NIM C02214032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Oktober 2018

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a series of smaller loops and lines on the right, ending in a small hook. The signature is written over a faint, illegible stamp or background.

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Arifa NIM. C02214032 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Sanuri, M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, S. HI., M.S.I  
NIP. 19891229015032007

Surabaya, 28 Desember 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI ARIFA  
NIM : C02214032  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : sitiarifah939@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2018

Penulis

(Siti Arifa)



















Pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi kurang memahami tentang keuangan syariah, oleh karena itu BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi bekerjasama sama dengan BMT Sidogiri dengan membuka cabang selain atas nama BMT Sidogiri. Setelah berdirinya dari tahun ke tahun, BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) tidak ada perkembangan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan sistem pemutaran modal tidak dilakukan dengan maksimal sehingga terjadi pengendapan uang.

Agar sistem pemutaran modal tersebut bisa produktif. BMT PUMA menyusun strategi berupa adanya produk-produk yang dapat membantu masyarakat dalam masalah ekonomi. Strategi tersebut berhasil dilakukan, terbukti masyarakat dapat menggunakan produk-produk yang ada di BMT PUMA.

Salah satu produk itu adalah simpanan qurban sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan qurban. Simpanan qurban tersebut menggunakan akad *wadī'ah*. Tetapi akad *wadī'ah* dalam produk simpanan qurban di BMT PUMA tidak dijelaskan secara detail apakah *wadī'ah* itu *yad amānah* atau *yad ḍamanah*.

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 simpanan qurban bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan melainkan pemberian sukarela dari lembaga. Pada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) penarikan dilakukan satu hari sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan mencapai target harga hewan yang telah disepakati.















dilakukan sekali yakni menjelang ibadah qurban dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Kesepakatan penarikan dana simpanan qurban hanya bisa diambil pada waktu hari raya qurban atau sesuai kesepakatan hanya boleh diambil sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut di luar kesepakatan boleh menarik dana simpanan, namun pihak BMT PUMA membebani biaya sebesar Rp. 5.000.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo” adalah simpanan qurban di BMT menggunakan akad *wadi'ah* dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan













Bab ketiga, merupakan data penelitian prosedur dan praktik terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) meliputi: profil BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) yaitu tentang sejarah berdirinya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), visi misi BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), struktur pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), tugas dan tanggung jawab pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), produk-produk di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), prosedur simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), akad dan aplikasi simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

Bab keempat, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), yang meliputi: analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA (analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap prosedur, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik).

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.







































antara lain : Mas Ghozali, Abd. Khaliq, Moch Hidayatullah, M Jaky, Muhammad Mas'ud, serta kepala desa.

*Baitul Māl wat Tamwīl* Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi atau disingkat PUMA berdiri pada tahun 2005 yang bertempat di Jl. Berbek III No.1, Waru Sidoarjo. Adapun pendiri dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) yaitu KH. Mas Ghozali, Abd. Kholik, M. Jaki, Muhammad Mas'ud serta mendapat dukungan dari Kepala Desa Berbek dan masyarakat sekitar. BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) sudah berbadan hukum dengan No.518/128/BH/404.3.4/3004.

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) adalah lembaga keuangan syariah yang berdiri di bawah naungan kelurahan dan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pertama dan satu-satunya yang berdiri di daerah Berbek yang beroperasi sebagaimana BMT pada umumnya.

BMT ini memiliki visi dan misi membantu para pengusaha kecil dalam memberdayakan usaha ekonomi yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan para usaha kecil terhadap rentenir. Hal tersebut juga disampaikan oleh Rohmatin Nuzulil Fitri sebagai customer servis di BMT PUMA :

“Pada awal pertumbuhannya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini banyak mengalami hambatan, baik internal maupun eksternal. Dari segi internal BMT mengalami kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) dan SDM yang belum terlatih. Sedangkan dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit dilakukan karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syari'ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta





































sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan. Ketika nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan, namun adanya biaya yang di bebaskan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak di ambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan dengan sekali penarikan. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut di luar kesepakatan, pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut dengan adanya biaya sebesar Rp. 5.000.

Ada beberapa nasabah menanggapi tentang BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi tentang produk simpanan qurban. Nasabah simpanan qurban adalah ta'mir masjid yang ada di wilayah berbek untuk membantu menyimpan dananya terutama untuk kegiatan qurban.

Simpanan qurban yang penarikannya diambil sebelum hari raya qurban atau sewaktu-waktu. Berawal membuka rekening dan dijelaskan kesepakatan yang telah ditentukan tentang simpanan qurban dengan akad *wadī'ah* dan penarikannya diambil pada waktu satu hari sebelum hari raya qurban. dalam pengisian formulir simpanan hanya selebaran kertas tanpa adanya surat perjanjian. Ketika nasabah mengambil sebelum hari yang telah disepakati pihak BMT memberikan dana yang diinginkan dan dibebani biaya kepada nasabah minimal Rp. 5.000. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Nasir (kutipan wawancara dengan ta'mir masjid al-Istiqomah Berbek):







## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA)

#### A. Prosedur dan Praktik terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA

##### 1. Prosedur terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban, dan diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyisihkan dana untuk melakukan ibadah penyembelihan qurban. Simpanan qurban ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semangat berqurban.

Mencapai tujuan tersebut sangat penting adanya mekanisme operasional yang bagus. Begitu juga di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), mekanisme operasional yang bagus akan membantu dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Mekanisme operasional BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip

sukarela, Prinsip memelihara nilai keadilan , prinsip mementing manfaat dan menghindari mudharat

Rukun *wadī'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah*. dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
- b. *Wādi'* (orang dititipi barang)
- c. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
- d. *Ṣīghat (ijāb dan qobūl)*

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus di penuhi sebelum melakukan akad *wadī'ah*. Syarat dalam akad *wadī'ah*, yaitu:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)
- b. *Wadī'ah* (barang titipan)
- c. *Ṣīghat (ijāb dan qabūl)*

Nasabah juga bisa melakukan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) atau melaksanakan sendiri. Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadī'ah* dan dalam satu transaksi bisa individu atau kelompok.

Syarat pembukaan Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Sidoarjo.<sup>1</sup>

- a. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- b. Pembukaan rekening Rp. 12.000
- c. Setoran awal minimal Rp. 100.000
- d. Setoran selanjutan minimal Rp. 50.0000

Pelaksanaan Simpanan Qurban memiliki alur dalam pembukuan rekening sebagian berikut:

Gambar 4.1  
Alur Pembukaan Rekening Simpanan Qurban



Keterangan:

- a. Nasabah datang membawa fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)
- b. *Customer Service* dimulai dengan wawancara dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai simpanan qurban dan memberikan formulir permohonan menjadi anggota di BMT PUMA yang harus diisi oleh nasabah.

<sup>1</sup>Brosur Pemasaran Produk-Produk BMT PUMA Sidoarjo.

c. Selanjutnya diproses dan nasabah mendapatkan tabungan simpanan qurban.

Prosedur pelaksanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadi'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati, BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah.

## 2. Praktik terhadap Simpanan Qurban di BMT

Simpanan qurban yang menggunakan akad *wadi'ah* yang digunakan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini hanya secara umum tanpa adanya kejelasan antara akad *wadi'ah yad amanah* atau akad *wadi'ah yad damanah*. Simpanan qurban yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Pelaksanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadi'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati, BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah apabila tidak sesuai kesepakatan.

Ketika nasabah sudah memenuhi syarat dan mendapatkan buku tabungan, maka nasabah setiap bulannya menyetorkan dana ke BMT PUMA dalam simpanan qurban. Penarikan hanya boleh diambil sekali.

Pihak BMT PUMA membantu nasabah mencapai tujuan yang diinginkan dalam simpanan qurban. Dan memberitahu dana yang didapatkan setiap bulannya. Penarikan dana simpanan qurban hanya boleh sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan, namun nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan tetapi ada biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak diambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan, seringkali nasabah ingin mengambil dananya sewaktu-waktu dan pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut. Nasabah pada waktu penarikan dana simpanan qurban dibebani biaya penitipan yang sebesar Rp. 5.000.

#### **B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA**

Kegiatan *mu'amalah* yang terjadi dikalangan masyarakat pelaku *mu'amalah* yang berhubungan dengan duniawi atau ukhrawi memang sangat

elastis, artinya selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan para masyarakat pelaku mu'āmalah.

Salah satu bentuk dari perkembangan tersebut adalah produk simpanan qurban yang disediakan oleh BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Namun perkembangan tersebut harus tetap memegang teguh ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan landasan-landasan hukum yang lain, yang mengatur tentang kegiatan *mu'āmalah*, khususnya ekonomi syariah.

#### 1. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Prosedur

Rukun *wadī'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah*. dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
- b. *Wādi'* (orang dititipi barang)
- c. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
- d. *Ṣīghat (ijāb dan qobūl)*

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus di penuhi sebelum melakukan akad *wadī'ah*. Syarat dalam akad *wadī'ah*, yaitu:

- a. *Muwaddi'* (orang yang menititpkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)

b. *Wadī'ah* (barang titipan)

c. *Ṣīghat* (*ijāb dan qabūl*)

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban. Syarat pembukaan simpanan qurban di BMT PUMA adanya yaitu:

- a. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
- b. Pembukaan rekening Rp. 12.000.
- c. Setoran awal minimal Rp. 100.000
- d. Setoran selanjutan minimal 50.0000

Dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah.

Maka penulis menganggap prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah No.02/DSN-MUI/IV/2000, mulai dari rukun dan syarat maupun kesepakatan antar nasabah dan pihak BMT PUMA.

## 2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad

Akad dalam arti segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

Akad atau kesepakatan dapat diartikan sebagai komitmen dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam akad terdapat keterkaitan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabūl* (pernyataan penerima kepemilikan). Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad
- c. *Ṣīghat* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Kemudian syarat dalam akad ada empat, yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad
- b. Syarat sahnya akad
- c. Syarat terealisasikan akad
- d. Syarat lazim.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.



Ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan akad.

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seorang yang dititipi barang oleh orang lain, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa akad *wadī'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *wadī'ah itu yad amānah* dan *yad dhamanah*.

Simpanan qurban dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dibuktikan dengan pelaksanaannya menggunakan akad *wadī'ah*, akan tetapi tidak dijelaskan apakah *wadī'ah itu yad amānah* atau *yad dhamanah*.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa setiap akad dalam bermu'amalah harus ada kejelasan dari segi akad dan kesepakatan. Namun dalam praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) hanya dijelaskan bahwa simpanan qurban menggunakan akad *wadī'ah* tanpa dijelaskan apakah itu *wadī'ah yad amānah* atau *yad dhamanah*. Sedangkan antara kedua akad *wadī'ah* tersebut kegunaannya sama namun tujuannya yang berbeda.

Namun dilihat dari prosedur yang ada di BMT PUMA penulis menganggap akad yang di gunakan yaitu *wadī'ah yad amānah*, karena nasabah hanya menitipkan saja, pihak BMT hanya orang yang dititipi barang oleh nasabah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipi tersebut.

Status *wadī'ah* tersebut *amānah* bukan *dhamānah*. sehingga kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secara sengaja.

Kemudian jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, bahwasanya akad *wadī'ah* bersifat simpanan, Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dilihat dari segi akad dalam fatwa dewan Syariah Nasional dijelaskan hanya akad *wadī'ah*.

Maka jika dianalisis praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam segi akad hanya bersifat titipan yang menggunakan akad *wadī'ah*.

### 3. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik

Dalam mencapai tujuan diperlukan mekanisme operasional yang bagus. Mekanisme operasional yang bagus akan membantu dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Mekanisme operasional BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip sukarela, suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kerelaan dari pihak yang membuat perjanjian untuk terwujudnya semua transaksi yang dilakukan.
- b. Prinsip kebebasan, kebebasan menentukan syarat-syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- c. Prinsip kejujuran dan kebenaran, salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam
- d. Prinsip memelihara nilai keadilan, pelaksanaan asas dalam suatu perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban.

- e. Tertulis, dalam melakukan perjanjian keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dan ada bukti yang telah disepakati.

Asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya perjanjian yang telah dibuat.

Dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadi'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA.

Ketika nasabah sudah memenuhi syarat dan mendapatkan buku tabungan, maka nasabah setiap bulannya menyetorkan dana ke BMT PUMA dalam simpanan qurban. Penarikan hanya boleh diambil sekali.

Pihak BMT PUMA membantu nasabah mencapai tujuan yang diinginkan dalam simpanan qurban. Dan memberitahu dana yang didapatkan setiap bulannya. Penarikan dana simpanan qurban hanya boleh sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan, namun nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan tetapi ada biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak diambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan, seringkali nasabah ingin mengambil dananya sewaktu-waktu dan pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut. Nasabah pada waktu penarikan dana simpanan qurban dibebani biaya yang sebesar Rp. 5.000.

Dalam kesepakatan yang sudah dibuat nasabah harus melaksanakannya dan ketika nasabah membutuhkan simpanan tersebut. Dari pihak BMT PUMA mengeluarkan biaya yang diluar kesepakatan. Sehingga BMT PUMA setiap pengambilan yang di luar kesepakatan akan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.

Biaya yang dibebani tidak seberapa besar dibanding uang yang dibutuhkan nasabah, sehingga nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya biaya tersebut. Meskipun terlihat sepele disitu letar permasalahan dengn adanya biaya diluar kesepakatan.

Maka jika dianalisis praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dari segi praktiknya, simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) jelas terdapat ketidaksesuaian dilihat dari kesepakatan

penarikan dana bahwa penarikan dana simpanan qurban hanya boleh diambil sekali saja pada saat mendekati hari raya qurban, namun dalam praktiknya boleh diambil setiap kali.sebelum waktu yang disepakati dan pihak BMT membebani biaya Rp. 5.000 diluar kesepakatan awal. Biaya tersebut denda yang diberikan oleh nasabah ketika mengambil penarikan diluar kesepakatan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadi'ah*, lalu terdapat kesepakatan. Praktik simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) nasabah mengisi formulir untuk mendapatkan buku tabungan, nasabah menyetorkan perbulan kepada BMT PUMA, penarikan dana pada waktu yang telah di sepakati kesepakatan oleh nasabah dan pihak BMT PUMA.
2. Dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi dalam simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), dilihat dari kesepakatan, ketika nasabah membutuhkan uang diluar kesepakatan dan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.

#### B. Saran

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya agar kedepannya tidak timbul kesalah pahaman. Bagi nasabah seharusnya memperhatikan kesepakatan yang telah di buat oleh pihak BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), karena suatu kesepakatan itu merupakan syarat utama dalam *bermu'amalah* yang telah diatur dalam Islam.





- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hoeve, Ichtiar Batu Van. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6. Jakarta: Internusa, 1997.
- Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Iryanti, Eva. *Hukum Islam Demokrasi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Batangkari Jambi No: 02 (2017).
- Ismiyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mardaris. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mashudi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Dalam <https://infoislamicbanking.wordpress.com>, diakses pada 22-01-2012 09.00WIB.
- Mas'ud, Muhammad. *Wawancara*. Sidoarjo 01 Agustus 2018.
- Masruhan. *Metologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, Yazid. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nasir, *Wawancara*, Sidoarjo 19 september 2018.
- Ningrum, Ida Febria. *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Korban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gresik*. Suarabaya: UINSA, 2018.
- Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nuzul, Rohmatun. *Wawancara*. Sidoarjo 01 Agustus 2018.
- Pasaribu, Chairum. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 13*. Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugesti, Zulfahqi Aqdam. *Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik*. Suarabaya: UINSA, 2015.
- Undang-Undang Repuplik Indonesia No.21 Tahun 2008
- Zainul, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2018.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Muamalat*. Damsik: Dar al-Fikri, 1987.